

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KUMA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Oleh

Rahman A. Majore
Evie A.A. Suwu
Jouke J. Lasut

Abstrak

Tantangan paling mendasar bagi Bangsa Indonesia memasuki era tinggal landas dan program Jangka Panjang Tahap II adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungan alam (Dahuri, 2008). Wilayah pesisir dan lautan serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya merupakan tumpuan dan harapan bagi bangsa Indonesia dimasa depan, karena wilayah pesisir dan lautan memiliki luas yang cukup besar yakni sekitar 63 % dari wilayah teritorial Indonesia. Wilayah pesisir dan lautan masih sangat potensial untuk dikembangkan karena di dalamnya terkandung kekayaan sumberdaya alam

Masyarakat Desa Kuma selama ini mengelola wilayah pesisir ternyata penghasilannya belum seperti yang diharapkan karena belum memanfaatkan secara maksimal potensi wilayah pesisir. Masyarakat Desa Kuma masih terfokus pada pengelolaan perikanan laut secara tradisional dan belum mengelola potensi lainnya seperti memanfaatkan potensi wisata laut, perikanan tambak apung (Jaring), pengelolaan rumput laut atau pembuatan cinderamata dari kerang-kerangan atau membuka rumah-makan ikan bakar dan lain-lainnya. Mata pencaharian sebagai nelayan ada waktunya panen yang melimpah tetapi ada juga masanya para nelayan harus istirahat melaut karena musim barat ataupun musin angin selatan sehingga mereka harus mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tidak melaut.

Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan adalah Desa di gugusan kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki karakteristik kawasan berbentang garis pantai, dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wilayah pesisir belumlah berkembang sehingga perlu bantuan program sehingga bisa menjadi urat nadi dan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Salah satu fokus perhatian pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Essang Selatan khususnya adalah obyek pembangunan kawasan wisata. Pembangunan di kawasan pesisir ini menjadi trend baru dalam pembangunan daerah. Proses pembangunan kawasan ini dilaksanakan dalam dua tahap yang pertama adalah yang terletak disebelah Barat yakni mulai dari kawasan utara kecamatan Essang Selatan sampai ke wilayah Essang Utara yang dikenal sebagai pantai paradise, sebagai langkah awal adalah pembangunan sarana jalan untuk membuka akses transportasi sebagai roda perekonomian masyarakat sehingga bisa meningkatkan penghasilan dan masyarakat akan menikmati kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik mengambil pokok bahasan penelitian ini dengan menitik-beratkan pada *“Pengelolaan wilayah pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”*.

Kata kunci : Pengelolaan, Wilayah Pesisir. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya merupakan tumpuan dan harapan bagi bangsa Indonesia dimasa depan, karena wilayah pesisir dan lautan memiliki luas yang cukup besar yakni sekitar 63 % dari wilayah teritorial Indonesia. Wilayah pesisir dan lautan masih sangat potensial untuk dikembangkan karena di dalamnya terkandung kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat beragam.

Masyarakat Desa Kuma selama ini mengelola wilayah pesisir ternyata penghasilannya belum seperti yang diharapkan karena belum memanfaatkan secara maksimal potensi wilayah pesisir. Masyarakat Desa Kuma masih terfokus pada pengelolaan perikanan laut secara tradisional dan belum mengelola potensi lainnya seperti memanfaatkan potensi wisata laut, perikanan tambak apung (Jaring), pengelolaan rumput laut atau pembuatan cinderamata dari kerang-kerangan atau membuka rumah-makan ikan bakar dan lain-lainnya. Mata pencaharian sebagai nelayan ada waktunya panen yang melimpah tetapi ada juga masanya para nelayan harus istirahat melaut karena musim barat ataupun musin angin selatan sehingga mereka harus mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tidak melaut.

Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan adalah Desa di gugusan kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki karakteristik kawasan berbentang garis pantai, dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wilayah pesisir belumlah berkembang sehingga perlu bantuan program sehingga bisa menjadi urat nadi dan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kepulauan Talaud, secara faktual tujuan dari pembangunan di wilayah pesisir adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberi keuntungan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Secara fisik pembangunan wilayah pesisir harus menjadi kawasan investasi yang mampu menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi.

Salah satu fokus perhatian pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Essang Selatan khususnya adalah obyek pembangunan kawasan wisata. Pembangunan di kawasan pesisir ini menjadi trend baru dalam pembangunan daerah. Proses pembangunan kawasan ini dilaksanakan dalam dua tahap yang pertama adalah yang terletak disebelah Barat yakni mulai dari kawasan utara kecamatan Essang Selatan sampai ke wilayah Essang Utara yang dikenal sebagai pantai paradise, sebagai langkah awal adalah pembangunan sarana jalan untuk membuka akses transportasi sebagai roda perekonomian masyarakat sehingga bisa meningkatkan penghasilan dan masyarakat akan menikmati kesejahteraan. Karena masyarakat yang bermukim di desa belum memiliki cukup kepedulian dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Pemenuhan hak-hak masyarakat dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir belum dilakukan secara baik, hal ini dapat dilihat dari menurunnya kondisi lingkungan pesisir, seperti rusaknya hutan *mangrove*, rusaknya terumbu karang. Menurunnya kualitas lingkungan wilayah pesisir disebabkan pula karena faktor pendidikan masyarakat yang rendah, fungsi kelembagaan adat tidak berjalan seperti yang dulu, norma-norma dan tata krama dalam menjaga lingkungan belum difungsikan secara baik, Oleh karena itu untuk menjaga kelestarian ekosistem diwilayah pesisir khususnya di Desa Kuma perlu penegakan hak masyarakat Desa Kuma, yakni yang berkaitan dengan hak menjaga lingkungan, hak mengurus dan mengelola lingkungan secara baik, hak memelihara lingkungan dengan meningkatkan fungsi kelembagaan adat dan hak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir. pengelolaan wilayah pesisir sangat berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengenal potensi wilayah mereka sebagai bagian dari kebutuhan, serta

bagaimana masyarakat adat mampu untuk menegakkan haknya yang dilindungi. Kenyataannya penegakan hak masyarakat dalam mengelola ekosistem dan pelestarian hanya diperuntukkan demi kepentingan publik semata, sedangkan masyarakat yang merasa memiliki kepentingan dengan hak-haknya diabaikan oleh pemerintah, di pihak lain terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir karena masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan wilayah pesisir.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik mengambil pokok bahasan penelitian ini dengan menitik-beratkan pada "*Pengelolaan wilayah pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*".

Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : " Bagaimana pengelolaan wilayah pesisir untuk Meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ".

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui "

- a. Peran Masyarakat Desa Kuma dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pentingnya pengelolaan Wilayah wilayah pesisir untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Kuma
- c. Pentingnya partisipasi masyarakat Desa Kuma melalui adat dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem wilayah pesisir

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah Desa Kuma dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam proses pengelolaan wilayah pesisir dan penegakan hak adat masyarakat dalam peningkatan aktivitas mereka. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penataan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kawasan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

b. Manfaat Ilmiah

Dari segi ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sosiologi dan pembentukan konsep-konsep Sosiologi Ilmu Lingkungan dan Sosiologi Masyarakat pesisir

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Penegakan Hak Lingkungan

Penegakan Hak masyarakat Desa Kuma dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu fakta yang terjadi ketika negara ini berusaha untuk memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup dan wilayah pesisir dari kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana, tetapi dilain pihak ada sekelompok orang baik itu penguasa dan pengusaha ataupun sekelompok orang yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tetap mengeksploitasi wilayah laut dan pesisir dengan sekehendak hati mereka. Akibat daripada tindakan mereka maka timbul konflik dengan masyarakat Desa Kuma yang tetap memelihara budaya dan adat istiadat. Penegakan hak adat masyarakat Desa Kuma terhadap lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah pesisir. Penegakan hak adat masyarakat Desa Kuma terhadap lingkungan hidup adalah cara untuk menegakkan hak-milik masyarakat Desa Kuma yang telah dirampas oleh para pengusaha dan penguasa, yaitu hak hidup dan hak untuk mengelola lingkungan tempat

mereka mencari nafkah untuk hidup. Kata “penegakan” berarti proses, perbuatan, cara menegakkan dan kata “ hak” berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia/Wikipedia Indonesia). Hak ulayat (hak wilayah) adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah dan air beserta isinya di lingkungan wilayahnya (*Kamus Besar Bahasa Indonesia/Wikipedia Indonesia*). “Lingkungan“ yang dimaksud dengan Lingkungan atau lingkungan hidup yaitu” Segala sesuatu disekitar suatu objek yang saling mempengaruhi (Soeratmo) atau Lingkungan Hidup Manusia Segala sesuatu disekitar manusia dan sistem hubungan (Soeratmo) atau Lingkungan Alam Suatu kesatuan areal tertentu dengan segala sesuatu yang berada di dalam sistem hubungan satu sama lainnya.

Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Selama bertahun-tahun mereka mengelola pesisir dan laut dengan arif dan bijaksana, karena mereka menyadari laut dan pesisir yang menghidupi mereka sehingga kelestariannya perlu dijaga secara turun-temurun, sebab masyarakat Desa Kuma percaya jika mereka salah mengelola maka sang penguasa alam akan murka dan tidak akan memberikan hasil laut kepada mereka (sebelum mereka mengenal agama) dan ketika mereka telah mengenal agama, maka mereka meyakini bahwa jika salah mengelola daerah laut dan pesisir maka Tuhan akan murka dan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Masyarakat adat Talaud selama ini dengan arif dan bijaksana mulai mengelola wilayah pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud dan terbukti bahwa sebelum Kabupaten Kepulauan Talaud berkembang dengan pembangunan, seluruh pantai merupakan pantai yang cukup lestari, dimana hutan bakau (mangrove) tumbuh dengan subur dan bisa melindungi pantai Desa Kuma dari abrasi. Memasuki tahun 2010 mulai terjadi perubahan peta pantai Kecamatan Essang Selatan akibat dibuatnya sarana rekreasi dan jalan serta perkembangan penduduk kearah wilayah pantai. Tahap pertama perubahan peta pantai Desa Kuma adalah pembuatan Jalan untuk kelancaran transportasi ke obyek wisata, setelah selesai pembuatan jalan tersebut, maka tahap berikutnya adalah mengadakan pembangunan penginapan dan cottage. Tahap selanjutnya pembukaan lahan-lahan di pinggiran pantai oleh pengusaha untuk dijadikan sarana hiburan dan wisata. Setelah itu penduduk dari daerah lainnya berdatangan untuk membuka usaha serta dijadikan pemukiman, yang kemudian pembukaan lahan pariwisata dan hotel-hotel oleh para pengusaha serta pengrusakan ekosistem pesisir dan laut oleh orang yang tidak bertanggung-jawab. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut pantai di kecamatan Essang Selatan telah mengusik masyarakat Desa Kuma yang mendiami pesisir pantai Kecamatan Essang Selatan, karena masyarakat Desa Kuma wilayahnya banyak diambil baik secara bujukan, maupun dengan paksa atau kekerasan, terutama wilayah strategis yang merupakan tumpuan hidup perekonomiannya, dan mereka mengadakan perlawanan dengan memblokir wilayah tersebut dan mengusir pemilik modal. Tetapi kenyataannya masyarakat mendapat Perlawanan dari pemilik modal dan kelompok pelindungnya yang dibayar serta tekanan dari pihak pemerintah. Teror dari pihak pemilik modal dan tekanan pemerintah menyebabkan masyarakat mengalami kekalahan baik itu di lokasi maupun hukum, karena pihak pengembang dan pemerintah lebih mengutamakan keuntungan ekonomi bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga masyarakat Desa Kuma banyak kehilangan wilayah perekonomiannya.

Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir

Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu mulai dikembangkan di banyak Negara. Seiring berkembangnya konsep tersebut, banyak negara mulai merencanakan dan melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Bappenas,2004). Bagi Indonesia, aplikasi konsep dan pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu

relatif masih baru, berbagai kegiatan dan program berkaitan dengan masalah lingkungan pesisir secara sporadis mulai dipraktekkan di dalam negeri sejak akhir dekade 1980-an. Namun saat itu hanya sebagian kecil yang benar-benar dirancang untuk menjalankan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia.

a. Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumberdaya alamnya telah dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani sejak berabad-abad yang lalu. Sementara itu kekayaan *hidrokarbon* dan mineral lainnya yang terdapat diwilayah ini telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain menyediakan berbagai sumberdaya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi, pelabuhan, kawasan Industri, Agrobisnis, Agroindustri, rekreasi dan pengembangan Pariwisata serta kawasan pemukiman. Dahuri, 1996). Bappenas (2004) wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan (Beatley, et al. 2002). Departemen kelautan dan perikanan (2003) dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No 27 Tahun 2007 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kearah darat sejauh pasang tertinggi dan kearah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan.

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*) maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas tegak lurus terhadap garis pantai. Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah misalnya batas wilayah pesisir antara sungai dan tanjung di lautan, akan tetapi penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, dan hingga kini belum ada kesepakatan, tentang batas wilayah pesisir dari satu negara ke negara yang lain berbeda, ini dapat dimengerti karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintahan tersendiri. Wilayah pesisir pada dasarnya dapat meliputi suatu kawasan yang sangat luas mulai dari batas lautan (terluar) ZEE sampai daratan yang masih dipengaruhi oleh iklim laut. Pada konsep lainnya suatu wilayah pesisir hanya meliputi kawasan peralihan antara ekosistem laut dan daratan yang sangat sempit, dari garis rata-rata pasang tertinggi sampai 200 m kearah darat dan kearah laut meliputi garis pantai pada saat rata-rata pasang terendah. Batasan wilayah pesisir yang sangat sempit ini dianut oleh Costarica, sementara itu negara-negara lain mengambil batasan wilayah pesisir diantara kedua konsep diatas. Wilayah pesisir pada dasarnya diimplementasikan dalam berbagai pemahaman antara lain : Pertama, bahwa batas wilayah pesisir kearah darat pada umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (*Mean High Tide*) dan batas kearah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yurisdiksi propinsi. Kedua, bahwa untuk kepentingan pengelolaan, batas kearah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam, yaitu batas untuk wilayah perencanaan dan batas untuk wilayah pengaturan atau pengelolaan. Ketiga ; bahwa batas kearah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah. Contohnya negara bagian California yang pada tahun 1972 menetapkan batas kearah darat wilayah pesisirnya sejauh 1000 meter dari garis rata-rata pasang tinggi, kemudian sejak tahun 1977 batas tersebut menjadi batas *arbitrer*.

Menurut Sugiarto (1976) wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin,

sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami, yang terjadi didarat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia didarat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Definisi wilayah pesisir seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Menurut kesepakatan internasional bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan kearah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan kearah laut meliputi daerah paparan benua (*Continental shelf*) (Beatley 1994), sedangkan batas kearah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri)

b. Sumberdaya Wilayah pesisir

Wilayah pesisir adalah unik, memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya Cincin-Sain dan Knecht, 1998. yang mengutip Scura et al, 1992, mengatakan bahwa di wilayah pesisir terdapat berbagai habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun (*sea grass*) dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyedia berbagai bahan kebutuhan hidup manusia (seperti ikan, minyak, mineral, kayu, dan lain-lain) dan penyedia jasa (seperti rekreasi, perlindungan alamiah terhadap bahaya alam seperti angin topan dan ombak, dan sebagainya) bagi komunitas yang tinggal diwilayah pesisir. Wilayah pesisir juga ditandai dengan kompetisi antar pemangku kepentingan mengenai wilayah dan sumberdaya yang ada yang sering berujung pada konflik dan kerusakan integritas fungsi ekosistem. Selain itu, wilayah pesisir menjadi tulang punggung ekonomi pemerintah dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada seperti pelabuhan dan perkapalan, pertambangan minyak dan gas bumi, serta wisata bahari. Wilayah ini juga menjadi tempat pilihan bagi banyak anggota masyarakat sebagai tujuan urbanisasi. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi begitu tinggi, namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka wilayah pesisir hendaknya ditangani secara terpadu. Menurut Dahuri (1996) dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat diwilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi boringtonia, estuaria, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman. Sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih. Sumberdaya yang dapat pulih antara lain meliputi sumberdaya perikanan (Plankton, benthos, ikan, moluska, krustasea, Mamalia laut dan lain-lain), rumput laut, padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang, sedangkan sumberdaya yang tak dapat pulih antara lain mencakup minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya.

Potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, selain kekayaan sumberdaya alam tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan, dan kenyataannya masyarakat pesisir, terutama nelayan, pembudi-daya ikan, serta pengolah dan penangkap ikan

berskala kecil masih tertinggal pada strata sosial ekonomi yang miskin. (Dwiponggo.1991). Oleh karena itu diperlukan kebijakan atau program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat pesisir sehingga selain dapat meningkatkan kesejahteraannya juga akan mendidik mereka lebih mandiri dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan Kartawinata. (1976). Naamin dan Hardjamulia (1990), bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung didalamnya. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera mengingat potensi sumberdaya alamnya yang besar namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir terutama nelayan, masih merupakan masyarakat yang dipersepsikan miskin jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan orientasi kebijakan pemerintah dimasa lalu kurang berpihak pada sektor kelautan, hal ini dibuktikan dengan minimnya pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan laut dan pesisir. Hal ini diperparah dengan rendahnya investasi usaha dalam sektor kelautan akibat dari kebijakan tersebut karena tingginya resiko usaha dalam bidang ini dan krisis kepercayaan terhadap masyarakat pesisir (Rais. 1994). Bengen (2003) menekankan perlunya penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu di Indonesia secara berkelanjutan, pertimbangannya selain alasan-alasan tersebut diatas, terjadinya degradasi dan depresi (makin menipisnya) sumberdaya disatu pihak. Sementara dilain pihak, adanya kecenderungan pemanfaatan yang tidak mengindahkan keberlanjutan ekosistem lingkungan pesisir dan lautan, ketika Indonesia berada pada kondisi krisis ekonomi dengan dalih agar cepat keluar dari krisis, banyak pembangunan sektoral, regional, swasta, dan masyarakat yang mengambil tempat dikawasan pesisir, seperti budidaya perikanan, resort wisata, industri, pertambangan, pelabuhan laut, dan reklamasi pantai untuk keperluan perluasan kota.

c. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Zona Management atau disingkat ICZM) merupakan cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia tetapi juga ditingkat dunia (IPCC,1994). Sehingga berbagai terminologi dengan arti yang sama yaitu merupakan kegiatan manusia didalam mengelola ruang, sumberdaya, atau penggunaan sumberdaya yang terdapat pada suatu wilayah pesisir. Sering dijumpai diberbagai pustaka tentang pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Bappenas (2004) manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu telah diuraikan dalam pedoman umum pengelolaan wilayah pesisir terpadu oleh Departemen Kelautan dan Perikanan seperti dikutip secara utuh dibawah ini. Manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu menjelaskan keuntungan langsung maupun manfaat tidak langsung yang dapat diperoleh apabila menerapkannya secara konsisten. Manfaat program pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat diambil oleh berbagai tingkat pemerintahan mulai dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan kota hingga desa, baik secara bersamaan maupun terpisah. Pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang konsisten serta sesuai dengan tujuan nasional dan daerah akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang berperan serta. seperti, pelestarian dan rehabilitasi terumbu karang dapat meningkatkan ketersediaan sumberdaya ikan, terutama yang bernilai ekonomis penting serta mempunyai nilai tambah terhadap jasa lingkungannya sebagai lokasi wisata bahari.

Besarnya manfaat program pengelolaan wilayah pesisir terpadu tergantung pada pandangan, persepsi, penilaian dan tujuan yang dikehendaki masyarakat itu sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir.

Manfaat keikutsertaan masyarakat didalam program pengelolaan wilayah pesisir terpadu antara lain :

- a. Keberlanjutan sumberdaya pesisir, seperti sumberdaya ikan, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun,
- b. Menghindari pencemaran dan melindungi kesehatan masyarakat,
- c. Meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari jasa lingkungan laut (pariwisata, energi nirkonvensional dan industri maritim),
- d. Mengembangkan bio-teknologi sumberdaya pesisir untuk produk farmasi, kosmetika, squalene, dan sebagainya,
- e. Mengembangkan sistem perekonomian berbasis masyarakat,
- f. Mengembangkan kearifan lokal bagi kelestarian ekosistem pesisir.

Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan disuatu wilayah pesisir dan lautan serta permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial. Pengetahuan ini sangat penting, karena ditujukan untuk memanfaatkan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Dahuri, 1996).

a. Potensi Dan Pembangunan Wilayah Pesisir

Menurut Dahuri (1996), bahwa potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok (1) sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*) (2) sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental service*). Pertanyaannya adalah sudah seberapa besar pemanfaatan yang telah digali dari ketiga kelompok sumberdaya tersebut. Jika pemanfaatannya dapat dioptimalkan akan menguntungkan bagi peningkatan *product domestic bruto* dan kesejahteraan rakyat. Perhitungan Tim CIDA/Bappenas (1998) pada tahun 1997 nilai ekonomi total yang dihasilkan oleh sebelas kegiatan pembangunan (pemanfaatan) sumberdaya pesisir dan lautan sebesar Rp. 36,6 triliun, atau sekitar 22 % dari total *product domestic bruto*. Kegiatan ini merupakan sumber mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung mendukung kegiatan ekonomi bagi 60 % penduduk Indonesia yang bermukim dikawasan pesisir.

b. Beberapa Permasalahan Wilayah Pesisir

Kegiatan pembangunan yang tidak terkendali seperti pengurasan pada sumberdaya wilayah pesisir secara langsung akan merusak lingkungan dan daya dukungnya. Karena saat ini wilayah pesisir dihadapkan berbagai permasalahan pelik yang mengancam integritas sumberdaya. (Dahuri, 2003). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diklasifikasi menurut tiga macam kategori, yaitu masalah bio-fisik lingkungan, sosial ekonomi, dan masalah kelembagaan.

1) Masalah bio fisik lingkungan.

Saat ini laju kerusakan bio fisik lingkungan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan mencapai tingkat yang membahayakan akibat ketidak-efektifan pengelolaan dan sebab-sebab lain, termasuk kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, laut dan bencana alam diwilayah pesisir. Menurut Dahuri (2003) bahwa luasan terumbu karang makin hari makin berkurang dimana seklitar 41 % diantaranya dalam kondisi rusak berat. Kawasan mangrove menyusut tiap tahun, sementara sumberdaya perikanan laut mengalami pemanfaatan yang berlebihan, yang terjadi diseluruh perairan laut Indonesia pencemaran laut terus berlanjut akibat dari kegiatan didarat, emisi pesawat terbang, pelayaran dan tumpahan minyak, pembuangan limbah kelaut serta kegiatan

penambangan minyak dan kegiatan lepas pantai lainnya. Selain akibat ulah manusia, bencana alam juga memberi pengaruh terhadap kerusakan ekosistem di wilayah pesisir.

2) Masalah Sosial Ekonomi.

Permasalahan wilayah pesisir lain yang tidak kalah pentingnya adalah marginalisasi masyarakat pesisir pada umumnya, terutama para nelayan kecil, sehingga sebagian besar dari mereka tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. (Bengen, 2001). Hasil studi COREMAP di 10 Propinsi pada tahun 1997/1998 (Dalam Bengen, 2001) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan perbulan berada jauh dibawah upah minimum regional perbulan. Hal ini sangat ironis karena wilayah pesisir menyimpan sumberdaya alam terbaharui yang begitu melimpah, namun kekayaan alam tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang bukan nelayan.

3) Masalah Kelembagaan.

Selain masalah kerusakan biofisik, dan masalah sosial ekonomi, wilayah pesisir juga menyimpan permasalahan kelembagaan yang rumit, yaitu masalah konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta ketidakpastian hukum. Konflik pemanfaatan dan kewenangan terjadi karena wilayah pesisir merupakan pertemuan antara kegiatan didarat dan kegiatan dilaut. Semua kegiatan didarat akan kelaut sudah pasti melalui wilayah pesisir, demikian juga sebaliknya. (Bengen, 2002). Hal ini makin diperburuk dengan kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada UU yang mengatur penataan ruang atau zonasi perairan laut di wilayah pesisir. Menurut Kajian Naskah Akademik yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan, sedikitnya ada 14 sektor pembangunan yang didukung oleh 20 UU tentang wilayah pesisir. Pembangunan sektoral pada umumnya mementingkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kepentingan sektornya dan kurangnya perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan pada sektor lainnya. UU yang ada tersebut dirasakan masih bersifat sektoral dalam mengatur ataupun memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir. (Kusnadi, 2007) ditemukan banyak konflik pemanfaatan dan kewenangan misalnya konflik kepentingan konservasi *mangrove* dengan pembangunan lapangan golf dan perumahan mewah, konflik antara nelayan tradisional dan nelayan trawl atau pembudidaya mutiara, konflik antara kepentingan konservasi perikanan tangkap dan pengembangan industri pariwisata, serta konflik lainnya.

Ketidakpastian hukum terjadi karena adanya *ambiguitas* pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. Pada umumnya masyarakat menganggap wilayah pesisir dan lautan sebagai wilayah tanpa pemilik, dilain pihak, pemerintah menganggap wilayah tersebut sebagai milik negara pada hal wilayah yang dikuasai oleh pemerintah tersebut sebenarnya adalah milik rakyat yang diwariskan sejak turun temurun, sementara masyarakat adat menganggap sebagai milik bersama (Hak Ulayat-*common property*). Hal ini masih diperparah lagi adanya konflik antar peraturan perundangan dan kekosongan hukum. contoh UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang jelas menyatakan bahwa ruang laut adalah wewenang pemerintah pusat, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan di daerah menyatakan bahwa penataan ruang laut sebatas 12 mil menjadi wewenang pemerintah daerah, atau terjadi kekosongan hukum seperti belum adanya peraturan mengenai pengusahaan bagian-bagian tertentu wilayah pesisir untuk usaha budidaya laut dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2006) dengan mendasari pada definisi atau pandangan para ahli menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan atau melakukan pengujian hipotesis (Arikunto, 2002). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggambarkan konsep, menghimpun fakta, akan tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari para informan yang di tetapkan, sedangkan data skunder merupakan data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain (Collin Finn, 1997).

Dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data (informan) adalah Apitarau (Kepala Desa), tokoh masyarakat 3 orang dan masyarakat pesisir 8 orang serta yang di ambil secara acak dan yang mempunyai informasi (ke-informan) yang di butuhkan di lokasi penelitian (di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud).

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview).
- b. Studi documenter.
- c. Observasi.

Metode Analisa Data

Data yang di kumpul dalam penelitian ini di olah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Penyajian Data. Data yang telah di reduksi kemudian di sajikan dalam bentuk :

1. teks naratif.
2. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Lokasi Penelitian

Batas-batas wilayah Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa

Desa Kuma terbagi atas 6 Wilayah Administratif yaitu rukun warga (RW) yang dipimpin oleh 6 orang Ketua RW sebagai perwakilan Kepala Desa Kuma dalam menjalankan roda pemerintahan. Wilayah Desa Kuma terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yang masing-masing Dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun.

Dusun sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Kuma memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan terhadap masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Orbitasi

Jarak dari Kantor Desa menuju ke Ibukota Kecamatan adalah sekitar 5 Km dan lama tempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekitar 50 Menit bagi yang berjalan kaki atau non kendaraan bermotor dapat di tempuh sekitar 120 menit.

Keadaan Penduduk Desa Kuma

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah total 392 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 195 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 197 jiwa

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Tradisi

Tradisi mengelola laut sudah mulai membudaya dalam kehidupan Desa Kuma telah menjadi ciri khas masyarakat. Tradisi baru mengelola lingkungan adalah bentuk dari kesadaran masyarakat menjaga alam ciptaan Tuhan yang telah dikaruniakan kepada masyarakat Desa Kuma. dalam bidang kerjasama yaitu saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih bertanggung-jawab terhadap lingkungan kehidupan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Kegiatan sektor perekonomian dan kehidupan sosial yang sejahtera adalah suatu kewajiban seluruh masyarakat Desa kuma sehingga setiap orang harus siap untuk menjadi pengelola dan pejuang lingkungan meningkatkan perekonomian seluruh anggota masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera tanpa merusak lingkungan sumber kehidupan.

b. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud yang kaya dan beragam sumberdaya alamnya telah dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani sejak dahulu kala. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menjadikan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan sebagai matra laut dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir. Salah satu titik perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Desa Kuma yang secara geografis merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Essang Selatan yang memiliki luas wilayah 208,00 Ha dan berada pada posisi 3 meter di atas permukaan air laut dengan suhu minimum 28⁰ C. Kondisi wilayahnya memanjang dari Utara keselatan, sementara bentuk wilayahnya berombak 30 % dataran rendah, 50 % dan berbukit 20 % Secara umum keadaan iklim yang ada di Desa Kuma adalah iklim basah tropis katulistiwa.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak R.M beliau adalah termasuk tokoh masyarakat Desa Kuma beliau saat ini berumur 56 tahun menyatakan bahwa sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 1990-an hutan mangrove masih tumbuh subur di desa ini bahkan beliau pernah membuat perahu pelang dengan panjang 13 Meter bentuk tengah Lunas 40 Cm untuk dijadikan alat transportasi mencari ikan Malalugis dan Ikan Roa dengan bantuan mesin motor tempel Even Road 25 PK yang didapat dari kredit Koperasi waktu itu. Penuturan beliau bahwa kayu bakau sangat berguna dan membantu masyarakat di desa Kuma, karena waktu itu masyarakat sebagian besar menebang pohon bakau untuk keperluan bahan bangunan rumah seperti papan, balok baik Totara maupun lata yang sangat berguna karena kayu ini sangat tahan lama. Jadi menurut R.M. waktu itu dengan banyaknya keperluan kayu bakau menjadikan kayu tersebut mulai berkurang. Penulis menanyakan kepada R.M. apakah waktu itu sudah terpikir oleh Bapak bahwa kelak dengan

penebangan pohon bakau akan terjadi kerusakan lingkungan diwilayah pesisir? Menurut penuturan R.M. bahwa dahulu beliau belum mengetahui kalau dengan menebang pohon bakau sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sehingga beliau sangat menyesal kalau dengan perlakuan pada masa lalu karena mengakibatkan kerusakan pantai di daerah kami, makanya saya berharap (Menurut bapak R.M.) kepada generasi muda dengan pengalaman kami dimasa lalu patut menjadi pelajaran buat anak cucu agar kelak pantai kita harus dijaga bersama untungnya sekarang ini masih ada orang yang peduli dengan desa kami sehingga mereka menanam pohon bakau kembali dan sekarang sudah kelihatan bahwa pantai yang ada menjadi hijau kembali dan sudah terlihat ada pohon bakau bertumbuh seperti pada masa kecil dulu saya lihat ada pohon seperti itu. Pada masa-masa itu juga untuk mencari ikan mulai sulit karena pohon bakau banyak yang rusak sehingga ikan berpindah tempat dimana banyak hutan bakaunya, saya baru memahami bahwa pohon bakau itu adalah merupakan pohon pelindung ombak dan juga tempat dimana ikan-ikan berkembang biak dan saya sempat melihat beberapa bencana ketika datang angin barat ada sebagian rumah yang tidak terlindung hutan bakau bersih disapu oleh ombak besar, demikian penuturan R.M. dengan pengalaman masa lalunya tentang kehidupan diwilayah pesisir. Tetapi dengan penanaman kembali pohon bakau bakau jika ombak besar tidak lagi takut karena sudah ada pohon pelindung mencari ikan juga sudah tidak perlu terlalu jauh, karena ikan dengan mudah bisa di dapat di wilayah pesisir saja. Masa-masa sulit sudah lewat dan pendapatan masyarakat sudah mulai ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terus menggali pengetahuan masa lalu tentang kehidupan diwilayah pesisir penulis mewawancarai Bapak Y.L tentang bagaimana kehidupan Bapak dengan laut karena beliau adalah seorang nelayan penulis menanyakan tentang mengapa sampai terjadi kerusakan karang diwilayah ini apa penyebabnya? Menurut penuturan Y.L pada waktu bertumbuhnya pohon bakau sebetulnya seiring dengan bertumbuhnya karang, maupun habitat lainnya, tetapi seiring juga dengan daur kehidupan di wilayah pesisir yang dulunya masih ditemukan berbagai habitat Teripang, seperti teripang pasir, teripang susu, bahkan kalau dikedalaman 4 sampai 10 Meter masih ditemukan teripang nenas namun saat ini kehidupan biota laut tersebut sudah jarang ditemukan lagi karena rusaknya karang. Rusaknya terumbu karang karena diambil oleh masyarakat untuk di jadikan material bangunan, tetapi dengan kesadaran masyarakat maka telah disepakati untuk melarang mengambil karang untuk di jadikan material bangunan, kembali bisa bertumbuh dengan baik dan ikan semakin banyak dan bervariasi, Ditambahkan oleh Y.L bahwa batas antara daratan dengan wilayah pesisir (dengan hutan mangrove diukur dari darat kelaut) diperkirakan hanya sekitar 50-100 Meter sesudah batas tersebut yakni sekitar 3-6 meter ditemukan karang yang masih hidup, menurut penuturan beliau bahwa lokasi karang diwilayah ini cukup jauh yakni sekitar 75-100 meter kearah laut dari batas hutan mangrove, setelah masyarakat tidak lagi menebang pohon bakau dan tidak lagi mengambil karang, berkembangnya biota laut menyebabkan semakin banyak pula keanekaragaman jenis burung. Jenis burung yang ditemukan oleh Y.L yakni burung Bangau, burung Elang, Elang laut burik, elang bendol, Elang Cina, burung dara laut sayap putih, tekukur, kasturi, burung hantu, burung gagak, burung raja udang dan berbagai jenis burung lainnya

Menurut bapak R.M. untuk mencegah kerusakan lingkungan pesisir dia sekarang membuka usaha penanaman rumput laut sebagai sampingan untuk menambah pendapatannya dan dari usahanya ini dia dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil rumput laut. Menurut bapak R.M, penghasilannya dari penanaman rumput laut cukup lumayan dan penghasilannya juga

meningkat dari biasanya sebulan hanya mendapatkan Rp. 2.000.000,- kini dia bisa mendapatkan Rp 3.500.000, perbulannya. Dengan usahanya itu bapak R.M. berharap lingkungan pesisir tidak menjadi rusak tetapi kembali menjadi lestari.

Secara umum di beberapa lokasi pengamatan penulis masih ada kerusakan karang sekitar 30 % sedangkan sisanya masih hidup dan menjadi tempat berkembang berbagai jenis ikan. Di wilayah ini juga masih ditemukan berbagai satwa endemik seperti dugon (Ikan Duyung), penyu hijau, penyu sisik walaupun jumlahnya tidak banyak. Di bagian Selatan sampai ke utara wilayah pesisir Desa Kuma masih ditemukan berbagai jenis ikan berukuran besar terutama yang bernilai ekonomis, ikan hias, ikan pelagis, hiu berkepala martil cakalang dan ikan dari marga yang sama tenggiri, ikan layar dan Marlin.

Menurut P.A, penanaman kembali pohon bakau menyebabkan ikan tidak lagi sulit didapatkan dalam jarak yang dekat nelayan sudah bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan pasar hampir tidak dapat menampung hasil tangkapan nelayan sehingga para nelayan termasuk saya berinisiatif mengawetkan ikan hasil tangkapan yang berlebihan dengan membuat ikan asin, yang kemudian kami kirim ke Manado untuk pemasarannya, dengan demikian pendapatan kami sebagai nelayan semakin meningkat dari biasanya hanya Rp. 1.700.000,- menjadi Rp. 3.000.000, perbulannya. Sehingga saya dapat menyekolahkan anak-anak dan kami tidak lagi dikuasai oleh pihak rentenir.

2. Faktor sosial Budaya dan Ekonomi

a. Pendidikan.

Secara umum tingkat pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir. Pendidikan merupakan rangkaian proses yang bermaksud untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan serta membantu kecakapan mental (Spencer dalam Machmur, 1988), menurut Takalamingan (2000) pendidikan merupakan prasyarat untuk mempertahankan martabat manusia. Melalui pendidikan seseorang diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan membina kehidupan masyarakat. Rangkaian proses yang bermaksud untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan serta untuk membangun kecakapan. Menurut Kartono dalam Baskoro (2000), seseorang tidak dapat melakukan kegiatan membangun apabila dia tidak terdidik, Karena itu pendidikan merupakan kunci bagi usaha menaikkan taraf kecerdasan bangsa dan proses pembudayaan masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi cakap, susila dan terampil selaku subyek pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan adanya perubahan sosial seperti yang dikemukakan oleh Mallassis (1978), bahwa dengan pendidikan masyarakat memperoleh pengetahuan yang luas dalam menentukan aktivitas. Demikian pula dengan pelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir maka faktor pendidikan juga akan menjadi salah satu faktor yang dominan, tingkat pendidikan masyarakat diukur dari pendidikan formal yang pernah mereka jalani sepanjang hidupnya. Oleh karena itu pendidikan formal dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang mereka jalani selama mereka bersekolah yaitu pendidikan SD, SLTP, SLTA dan Sarjana. Persentase terbesar tingkat pendidikan formal pada masyarakat di Desa adalah lulusan SD yaitu sebanyak 50 % kedua didominasi oleh pendidikan formal SMP Kuma yaitu 3 orang yaitu 30 % sedangkan pendidikan SLTA ada 2 orang yaitu 20 %, tingkat pendidikan formalnya.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir juga mendapatkan perhatian (Kartodihardjo, 2003), pembangunan wilayah pesisir yang kurang maksimal tentu tidak

dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang bermukim dalam kawasan wilayah pesisir sejak dahulu kala masih tetap menggantungkan kehidupan mereka pada kawasan wilayah pesisir, oleh karena itu wilayah pesisir menjadi tumpuan utama mata pencaharian atau menjadi salah satu tumpuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Sistem mata pencaharian penduduk didominasi oleh nelayan dimana jumlah penduduk sebagai adalah 392 orang, nelayan 155 orang, pedagang 8 orang, PNS 5 orang, dan Pensiunan 2 orang pekerjaan lainnya adalah sebanyak 46 orang. Melalui mata pencaharian penduduk tersebut diatas akan dapat dicerminkan tingkat pendapatan. Pendapatan menurut Suparmoko (1981) sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan, menurut Mubyarto (1985), pendapatan seseorang berkaitan erat dengan suatu jenis pekerjaan yang dilakukan, baik ia sebagai buruh, pegawai, petani dan sebagainya. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk tabungan, usaha dan sebagainya.

Tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat di wilayah pesisir pada umumnya masih rendah yaitu antara Rp. 1.600.000-2.000.000/Bulan sebanyak 30% untuk pendapatan dibawah dari \leq Rp. 2.600.000/Bulan terdapat 30% dan diatas dari Rp. 3.600.000/bulan terdapat 40%. Rendahnya tingkat pendapatan dari masyarakat tentu akan berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya di wilayah pesisir. Untuk meningkatkan kelestarian ekosistem lingkungan pesisir, maka peningkatan pendapatan masyarakat harus dipertimbangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendapatan atau tingkat ekonomi masyarakat turut mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah pesisir. Makin baik tingkat ekonomi masyarakat maka semakin mempengaruhi tingkat kualitas pengelolaan wilayah pesisir khususnya di Desa Kuma. Kegiatan lainnya adalah pemanfaatan lahan hutan bakau sebagai usaha kegiatan budidaya air payau seperti memelihara ikan kakap, Goropa, Kuwe, dan berbagai jenis ikan lainnya khususnya di area tambak dibagian Utara Desa Kuma. Dari data yang ada lokasi tambak yang dimanfaatkan oleh penduduk/pengusaha dulunya adalah kawasan hutan bakau sebesar 4 Ha, yang digarap oleh pengusaha/penduduk pendatang untuk kegiatan tambak ikan.

Menurut Y.L. keadaan perekonomian masyarakat nelayan di Desa Kuma termasuk kategori sedang, karena penghasilan nelayan rata-rata perbulannya hanya Rp. 1.700.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- dibandingkan biaya hidup yang harus dikeluarkan, itu diwaktu cuaca baik dan bersahabat, tetapi pada waktu musim angin selatan dan barat para nelayan secara umum tidak ada yang turun melaut karena ganasnya ombak di lautan, pada saat itu kami para nelayan terpaksa mencari nafkah di darat yang tentunya hanya kerja secara berkala tidak secara rutin, sehingga kami harus berhutang kepada pihak rentenir untuk menutupi kebutuhan hidup dan akan kami lunasi ketika sudah turun melaut kembali.

Kondisi kesejahteraan sosial yang buruk kalangan masyarakat tentu akan mengancam kualitas dan kelestarian ekosistem pesisir secara berkesinambungan dan ini sangat dirasakan oleh desa-desa disekitar wilayah pesisir yang berkaitan dengan hutan mangrove seperti menurunnya hasil tangkapan ikan karena dipengaruhi oleh ketersediaan makanan ikan yang semakin menurun tangkapan atau pendapatan yang diperoleh bersifat fluktuatif, tidak pasti dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah-tangga masyarakat disekitar wilayah pesisir akan berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan. Ketiga aspek tersebut merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah-tangga yang

ada disekitar wilayah pesisir yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit dalam membangun kualitas sumberdaya masyarakat dalam lingkungan wilayah pesisir, agar mereka memiliki kemampuan yang optimal dalam mengelola potensi sumberdaya yang ada.

c. Faktor Budaya

Pendekatan budaya dalam pengelolaan wilayah pesisir kini dianggap penting dalam meningkatkan kelestariannya. Banyak program yang sudah dikembangkan dalam pelestarian ekosistem wilayah pesisir seringkali tidak berhasil dan mengalami kegagalan karena mengabaikan budaya masyarakat lokal yang merupakan suatu bentuk kearifan yang perlu dijaga, karena berkaitan dengan norma, adat istiadat, nilai-nilai, agama, yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan kelestarian ekosistem wilayah pesisir. Dibeberapa daerah pantai nilai budaya menentukan akan kesinambungan ekosistem serta mereka bisa merawat hutan, memelihara, mengawasi, serta dapat meningkatkan populasi hutan, banyak manfaat dari kebudayaan masyarakat lokal yang melahirkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pelestarian Ekosistem Wilayah Pesisir

Seperti yang dikemukakan Harahap (2008) bahwa lingkungan sumberdaya alam kian waktu mengalami penurunan dan kerusakan yang sangat serius dan itu telah terjadi dimana-mana baik itu disengaja ataupun tanpa disengaja, Salah satu penyebabnya adalah kesalahan paradigma dalam memahami sistem lingkungan dan nilai-nilai dan jasa-jasa lingkungan sumberdaya alam. Kesalahan paradigma tersebut terjadi karena ketidak-tahuan dan ketidak-mampuan cara menilai atau evaluasi ekonomi sumberdaya alam tersebut, sehingga dalam pemanfaatan dan perencanaan wilayah nilai-nilai ekonomi dan ekologi suatu sumberdaya tidak diperhitungkan dengan sebenarnya.

Melana (2000) sangat penting untuk memanfaatkan masyarakat yang bermukim di daerah pantai sebagai partner dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir yang meliputi hutan bakau (mangrove), rumput laut, ganggang, dan ekosistem batu karang, mengembalikan dan membarui sumber daya alam yang rusak dengan penanaman kembali hutan mangrove, menjadikan area hutan di daerah rawa sebagai kawasan hutan lindung, selain itu pemerintah juga harus meluncurkan program bagi masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Beberapa hal yang disarankan untuk mempertahankan ekosistem wilayah pesisir serta sumberdaya perikanan adalah: (1) berusaha mengembalikan hilangnya produktivitas dari akibat kerusakan hutan yang gundul melalui aktivitas penanaman kembali secara terus menerus dan melindungi hutan yang masih tersisa, (2) menciptakan teknologi baru untuk pengelolaan wilayah pesisir yang ramah lingkungan (3) Rehabilitasi dan proteksi terhadap kawasan penting pantai lainnya yang dinilai sama (4) perlunya politisi yang berpotensi sebagai pemimpin daerah untuk mewujudkan UU wilayah pesisir, perikanan dan menginstitusikan pengelolaan area pantai sebagai wilayah dengan hak istimewa.

Menurut A.S. bahwa pengelolaan wilayah pesisir memang dapat dianggap penting, karena dia belajar dari pengalaman masa lalu dimana kerusakan pantai diakibatkan oleh karena berkurangnya hutan bakau (mangrove). A.S. menghimbau kepada generasi sekarang hendaknya kiranya lebih berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir, generasi muda sekarang perlu diberikan kesadaran dalam menjaga wilayah pesisir khususnya tidak menebang hutan diarea sekitar wilayah pesisir karena menurut A.S akan berakibat pada kerusakan lingkungan diwilayah pesisir dan dari pernyataan informan diatas

dapat difahami bahwa masyarakat diwilayah pesisir menganggap manfaat pengelolaan wilayah pesisir penting, namun dapat difahami juga bahwa masih ada masyarakat yang kurang menyadari pentingnya pengelolaan wilayah pesisir. karena sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih kurang dan tindakan masyarakat masih sebatas memanfaatkan hasil dari laut dan hutan Bakau (mangrove), upaya menjaga dan melindungi masih belum terlalu baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ternyata masih ada masyarakat desa wilayah pesisir yang masih sering merusak tanaman hutan bakau (mangrove), seperti mencari cacing dengan memotong perakaran pohon bakau (mangrove).

Masyarakat banyak yang memanfaatkan lahan diwilayah pesisir sebagai tempat jebakan, mereka membuat kubangan ditanah dalam hutan mangrove dan berfungsi sebagai penjebak kepiting yang habitatnya didalam hutan mangrove, menurut hasil penelitian ada sekitar 12 orang senantiasa mencari kepiting bakau dalam wilayah mangrove tersebut. Pencari tiram ada sekitar 23 orang dan kebanyakan mereka adalah wanita (ibu-ibu). Selain itu ada sekitar 40 orang sebagai nelayan yang beroperasi diperairan sekitar hutan mangrove di Desa Kuma, disamping kegiatan tersebut ada beberapa warga desa tetangga juga mencari cacing dilahan tersebut, kegiatan seperti itu sering meresahkan masyarakat yang peduli dengan lingkungan diwilayah pesisir, karena cara mencari cacing seringkali merusak atau memutuskan perakaran hutan Bakau (mangrove). Sampai saat ini pencegahan terhadap pelanggaran kegiatan tersebut belum dianggap efektif mendorong penulis mengungkapkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan wilayah pesisir

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kuma memberikan pernyataan bahwa manfaat pengelolaan wilayah pesisir dianggap penting. Hal ini dimaklumi karena sebagian besar menyadari, dan mengetahui manfaat pengelolaan wilayah pesisir. Namun secara faktual kesadaran dalam pengelolaan wilayah pesisir, masih minim dalam menjaga dan melindungi serta melestarikan, ini dapat dibuktikan bahwa masih ada masyarakat adat di wilayah pesisir yang merusak lingkungan.
- b. Penegakan hak masyarakat Desa Kuma dalam pengelolaan wilayah pesisir belumlah optimal, pada hal masyarakat memiliki suatu kearifan lokal dalam menjaga lingkungan pesisir. Masyarakat Desa Kuma adalah masyarakat yang memiliki kebudayaannya sendiri, memiliki aturan secara normatif dan Kewenangan masyarakat Desa Kuma tidak hanya sebatas obyek tanah, tetapi juga atas obyek sumberdaya alam. Semua hak hak dan kewajiban yang diberlakukan haruslah mendapat dukungan hukum secara tertulis oleh pemerintah dan pengakuan secara normatif bahwa kehidupan mereka ada dan tetap eksis
- c. Rendahnya kualitas ekosistem wilayah pesisir dipengaruhi oleh budaya masyarakat, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena belum mendapat dukungan dari pihak pemerintah untuk penerapan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena dengan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian wilayah pesisir perlu dilakukan. Berbagai upaya perbaikan yang antara lain 1). Pemberdayaan masyarakat, 2). Perbaikan taraf hidup, 3). Mengaktifkan kearifan-lokal, 4). peran pemerintah untuk memfasilitasi berbagai kebijakan dan program pembangunan wilayah
- d. pesisir, 5). Perlunya penegakan aturan yang dapat dukungan dari masyarakat.

Saran

- a. Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah pesisir dipengaruhi oleh kurangnya peran serta dari pihak masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan bahwa masyarakat bisa lebih berperan aktif lagi dalam proses pengelolaan lingkungan pesisir untuk memanfaatkan potensi wilayah yang dipertahankan masyarakat melalui kearifan lokal khususnya menjaga dan melestarikan, serta melindungi wilayah pesisir.
- b. Hak masyarakat harus dikembalikan, karena merupakan kewenangan untuk bisa mengatur tata kehidupan masyarakat berdasarkan aturan yang disepakati bersama oleh seluruh komponen masyarakat dan harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi sehingga dengan pemberian hak tidak merugikan salah satu pihak khususnya bagi masyarakat Desa Kuma. Hak masyarakat merupakan hak azasi yang harus dilindungi dengan UU. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah lebih mengutamakan azas kepastian hak dalam mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir dan lautan dengan berdasarkan pada azas taat, azas keadilan, kelayakan, kesamaan, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Melalui hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat adat melalui aktivitas kelembagaan, perlunya peningkatan pendidikan non formal melalui pendidikan dan latihan keterampilan dalam mengelola dan menjaga wilayah pesisir yang baik dan benar, memaksimalkan keterampilan masyarakat adat dalam berusaha, serta selalu memelihara dan mentaati berbagai ketentuan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim 1998, *Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir*, Sinar Media Jakarta.
- Anyang Thambun YC, 1998, *Peran Masyarakat Adat dalam pengentasan Kemiskinan*, Journal Coastal and Marine Resources. Edisi 3 Tahun 1998.
- Ayatrohaedi, 1986, *Hutan Mangrove fungsi dan Manfaatnya*, Pradnya Paramita. Jakarta
- Bengen, Dietriech G. 2005. *Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), Interaksi Daratan Dan Lautan Pengaruhnya Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan*. Lembaga Pengetahuan Indonesia, LIPI Press Jakarta.
- Bengen, Dietriech G. 2002. *Sinopsis: Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Bungin, B.M, 2010, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta, Kencana.
- Bungin B.M, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Caroline Nyamai-Kisia 2010, *Education a guide for planner and managers The Ecotourism society*, North Benington vetmont.
- Cincin-Sain dan Knecht, 1998, *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices*, Island Press, Washington DC.
- Dahuri, Rochmin; Jacob Rais; Sapta Putra Ginting; M.J Sitepu, 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Cetakan ke dua, Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, Rochmin, 2003. *Pengelolaan Kawasan Laut dan Pesisir Secara Terpadu di Indonesia, Makalah kursus pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, LP-ITS. Surabaya dengan PPPSL.
- Dwiponggo. 1991, *Karakteristik pengelolaan hutan berbasis masyarakat*, Penerbit RUDL.

- Fauzi, Ahmad. 2004., *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gobyah 2003, *Kearifan Lokal Masyarakat adat dan struktur Perubahan Sosial*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Harahap 2008, *Managament Partisipatif Suatu Analisis Situasi Sosial bagi Masyarakat adat*, Kanisius Yogyakarta.
- Haryati Soebadio 2001, *Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas sumberdaya alam*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hassan Shadily, 2001, *Kamus Inggris-Indonesia*, John M. Echols Penerbit PT Balai Pustaka Nasional.
- Husaini Usman & Purnomo S. Akbar, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ida Bagus 2005, *Adat Istiadat Masyarakat Bali*, PT Gramedia Jakarta.
- Koesoebiono 1995, *Ekonomi sumberdaya dan Lingkungan Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*, Akademika Persindo.
- Machmur, 1988, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Sinar Media Jakarta.
- Melana 2000, *Masyarakat Adat di Tengah Perubahan Global*, PT Gramulia Persada
- Moniaga, Sandra 2003, *Between Adat Laws and State Laws: Finding Ways to Reconcile Land Tenure System Conflicts in Indonesia* focuses on *land tenure conflict between adat (customary) communities and the state, (reserarch)*, Van Vollenhoven Institute, Universiteit Leiden.
- Moleong Lexy. L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Nasution, 2001, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Noer Fauzi 2000, *Kumpulan tulisan dalam kelompok diskusi Adat Indonesia, Masyarakat Adat dalam mengelola Sumberdaya Alam*, Cisarua 26-28 Mei, 2000, ICRAF-JAPHAMA.
- Rais. J. 1994, *Pengelolaan wilayah pesisir terpadu suatu konsepsi*, Jakarta Indonesia.
- Rohidi, R.C. Dan Mulyarto, 1922, *Analisis data kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sarwono Kusumaatmadja, 1996, *Bunga rampai hukum Laut*, Bandung Bina Cipta.
- Suhardjito, Khan, Djatmiko dkk, 2009, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Nusantara*, Pelita Mas.
- Sudarmadji 2001, *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Sugiarto, 1976, *Pedoman umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Lembaga Oceanologi Nasional Jakarta.
- S. Swarsi Geriya 2004, *Sustainability and the Questions of Environment in Integrated Coastal Management, The Case of Nain Island, Bunaken National Park*, dalam Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition No. I.